

## BAB II

### HUBUNGAN TIONGKOK DAN KAMBOJA

Berdasarkan pada penjelasan dalam latar belakang dan landasan teori pada bab sebelumnya, bab ini akan berupaya melihat bagaimana dinamika perkembangan hubungan Tiongkok dan Kamboja. Dimulai dari sejarah singkat hubungan kedua negara, perkembangan hubungan kedua negara dari *comprehensive partnership* hingga *comprehensive strategic partnership* hingga kedekatan kedua negara. Analisis dalam tulisan ini bersifat deskriptif, dan penulis akan membagi analisis menjadi tiga bagian.

*Pertama*, penulis akan membahas sejarah singkat hubungan kedua negara sejak tahun 1958 yang menjadi awal dari hubungan diplomatik kedua negara dan adanya gesekan pada masa itu yang bahkan hampir memutuskan hubungan diplomatik yang belum lama mereka bangun, hingga hubungan mereka yang kembali membaik dan melihat *Huaqiao* di Kamboja. *Kedua*, bab ini akan memaparkan perkembangan hubungan kedua negara yang awalnya *comprehensive partnership* menjadi *comprehensive strategic partnership* serta melihat kerja sama mereka dalam perjanjian lainnya. Berkembangnya hubungan tersebut tentu menandakan bahwa hubungan kedua negara semakin dekat. *Ketiga*, sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang perkembangan hubungan kedua negara, maka pembahasan ketiga ini akan melihat kedekatan kedua negara seperti dukungan diplomatik di skala dan forum regional maupun internasional.

## II.1 Sejarah singkat hubungan kedua negara

Melihat kembali pada awal hubungan kedua negara terbangun di zaman kuno ketika diplomat Tiongkok yang bernama Zhou Daguan berkunjung ke Angkor dari Kerajaan Khmer tahun 1296 – 1297. Ia juga meninggalkan satu-satunya catatan tangan dari Kerajaan Khmer dalam bukunya, *The Customs of Cambodia*. Selain itu, ada juga bukti hubungan kedua negara pada periode Dinasti Ming dan periode Kerajaan Angkor yaitu berupa lukisan-lukisan di Museum Nanjing, sekitar enam lukisan menggambarkan hubungan Tiongkok dan Kamboja pada masa itu (Nhean, 2013).

### Gambar II.1

#### Lukisan Bukti Adanya Diplomasi Antara Dinasti Ming dan Kerajaan Khmer di Abad ke-14



**Sumber:** Nhean, 2013

Kemudian hubungan kedua negara meningkat setelah Kerajaan Kamboja secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan hubungan diplomatik terbangun (Graceffo, 2017). Pasca berdirinya RRT, pada April 1955 pertemuan antara Perdana Menteri Zhou Enlai dan Pangeran Norodom Sihanouk membuka

babak baru hubungan bilateral kedua negara. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli 1958 hubungan diplomatik antara kedua negara secara resmi dibangun (Sokunthea, 2016).

Pada 1960-an Pangeran Sihanouk membantu memecahkan isolasi Tiongkok dengan berkampanye di PBB untuk mengusir Republik Tiongkok (Taiwan). Akan tetapi Sihanouk hampir memutuskan dengan Tiongkok pada 1967 saat ia mengetahui bahwa Kedutaan Besar Tiongkok di Phnom Penh adalah kekuatan di belakang rezim Pol Pot yang menjadi pemberontak komunis di Kamboja. Tak lama hubungan kedua negara kembali membaik karena Tiongkok menampung Sihanouk pasca dikudeta oleh Jendral Lon Nol pada tahun 1970. Di sisi lain, Tiongkok tetap mendukung rezim Pol Pot melalui pemberontakan, genosida hingga perdamaian (Sambath, 2008). Selama masa penjajahan rezim Pol Pot dan invasi Vietnam, Kamboja tetap memiliki hubungan dengan Tiongkok. Yang kemudian melancarkan invasi balasan ke Vietnam hingga menyebabkan perang saudara di Vietnam. Lalu sejak tahun 1989 Kamboja telah mengikuti Tiongkok ke pasar bebas dan menerapkan program reformasi ekonomi privatisasi perusahaan milik negara, memperbaiki hak kepemilikan pribadi, menghapus kontrol harga, dan membuka peluang investasi asing (Jeldres, 2003).

Pasca lepas dari pemerintahan Vietnam membuat partai *Cambodian People's Party* (CPP) berkuasa di Kamboja. Trauma dengan masa lalu, CPP tetap mewaspadaai Tiongkok akibat dukungannya terhadap *Khmer Rouge*. Menyadari hal tersebut membuat Tiongkok mendekati para pemimpin CPP, sehingga pada tahun 1997 hubungan diplomatik kedua negara mulai pulih dan dengan cepat Tiongkok menjadi salah satu pendonor bantuan asing paling penting bagi Kamboja. Awal

imbalan dari Kamboja ke Tiongkok ialah pada saat Kamboja sangat mendukung kebijakan *One China Policy* dengan bukti menutup Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Taipei (Kung, 2014).

Perluasan kerja sama bilateral pertama kali terjadi di akhir tahun 2000 yang disepakati oleh Presiden Jiang Zemin yang menjadi pemimpin Tiongkok pada saat itu dengan Perdana Menteri Hun Sen ketika kunjungan Presiden Jiang Zemin pertama kali ke Kamboja yang juga bertemu dengan Raja Norodom Sihanouk dan dengan banyak pejabat Kamboja lainnya. Dalam kesepakatan perluasan kerja sama tersebut, kedua negara juga menandatangani tujuh rangkaian perjanjian bantuan ekonomi dan pertanian (France-Presse, 2000). Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Zhu Rongji, dua tahun kemudian yang mana sebelumnya Tiongkok menarik kembali hutang Kamboja senilai US\$ 200 juta. Ditambah lagi pada kunjungan Perdana Menteri Zhu tersebut, Tiongkok memberikan pinjaman tanpa bunga dan bantuan dana dengan total US\$ 12,5 juta. Selain itu, kedua negara menyepakati bahwasannya bidang pertanian, sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur merupakan bidang-bidang yang harus diprioritaskan dalam kerja sama bilateral mereka (Mengchou, 2008).

**Table II.1**

**Periode Kunjungan Resmi dari Tiongkok ke Kamboja**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Pengunjung</b>
2000	Presiden Jiang Zemin
2002	Perdana Menteri Zhu Rongji
2005	Ketua <i>Committee of the National People's Congress, Wu Bangguo</i>
2006	Perdana Menteri Wen Jiabao

**Sumber:** *Economic and Commercial Councillor's Office of the Embassy of the People's Republic of China in Cambodia*

**Table II.2**

**Periode Kunjungan Resmi dari Kamboja ke Tiongkok**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Pengunjung</b>
2004	Perdana Menteri Hun Sen
2006	Perdana Menteri Hun Sen
2006	Raja Norodom Sihanouk

**Sumber:** *Economic and Commercial Councillor's Office of the Embassy of the People's Republic of China in Cambodia*

Dari tabel diatas terlihat bahwa kedua negara cukup sering melakukan kunjungan resmi dalam upaya memperkuat hubungan bilateral mereka, bahkan sebelum disepakatinya perjanjian kerja sama *comprehensive partnership*.

Kemudian melihat bahwa hubungan kedua negara telah terjalin sejak tahun 1296 M dan Huaqiao telah ada di Kamboja sejak abad ke-13, sehingga perlu melihat

*Huaqiao* karena akan menjadi faktor penentu *soft power* Tiongkok di Kamboja yang akan dijelaskan di bab 3. Sebagaimana dalam tulisan Zhou Daguan yang mengatakan bahwa sudah ada beberapa etnis Tionghoa di Kamboja pada abad ke-13, namun di Kerajaan Funan sudah ada etnis Tionghoa di Kamboja dari abad pertama hingga ketujuh. Mereka terdiri dari keluarga-keluarga kecil yang tinggal di Kamboja, beberapa menikah dengan orang Kamboja.

Pada abad ke 17 kelompok-kelompok besar baru berdatangan ke Kamboja. Hal tersebut dikarenakan digulingkannya Dinasti Ming dan naiknya Dinasti Qing yang keji menyebabkan orang-orang Tionghoa memutuskan untuk pindah dan mencari suaka politik ke Dai Viet, yang sekarang menjadi bagian utara dari Vietnam. Vietnam yang saat itu tidak ingin membuat buruk hubungannya dengan pemimpin baru Tiongkok memutuskan untuk mengizinkan orang-orang Tionghoa untuk pergi ke selatan hingga memasuki Kerajaan Champa dan Kerajaan Khmer, beberapa juga masuk melalui Sungai Mekong dan menetap di wilayah Kampot di Kamboja. Kelompok-kelompok tersebut tinggal bersama dengan orang-orang yang berbicara bahasa yang sama dengan mereka di Kamboja (Filippi, 2013). Yang perlu diperhatikan dari *Huaqiao* adalah mereka banyak berpartisipasi pada sektor ekonomi dan budaya di Kamboja dan menjadi salah satu alasan kembalinya hubungan Tiongkok dan Kamboja serta peningkatan kerja sama mereka.

## **II.2 Dari *Comprehensive Partnership* menjadi *Comprehensive Strategic***

### ***Partnership***

Bentuk kemitraan *comprehensive partnership* disepakati kedua pemerintah negara pada April 2006 pasca kunjungan Perdana Menteri Tiongkok, Wen Jiabao,

ke Kamboja. Di era baru dimana hubungan bilateral dan multilateral semakin populer, keputusan kedua pemerintah untuk membentuk kemitraan tersebut karena memandang bahwa memperkuat hubungan kerja sama dengan mitra terdekat sangat penting dan signifikan. *Comprehensive partnership* yang disepakati Tiongkok dan Kamboja berisi tentang kepentingan fundamental dari kedua negara dan guna meningkatkan perdamaian, stabilitas dan pengembangan kawasan (Lei, 2006). Kemudian dari kepentingan fundamental tersebut diperluas pada bidang-bidang lain yakni:

- a) Mengkonsolidasikan persahabatan tradisional kedua negara dan meningkatkan rasa saling percaya. Saling melakukan kunjungan tingkat tinggi dan upaya meningkatkan pertukaran persahabatan dan kerja sama antar departemen pemerintah, parlemen, partai politik, angkatan bersenjata, pemerintah lokal dan organisasi non-pemerintah. Pertukaran dan kerja sama tersebut berupaya untuk memperdalam rasa saling mengerti dan menjaga kepercayaan (Joint Statement between the Kingdom of Cambodia and the People's Republic of China, 2016).
- b) Mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam mencapai pembangunan bersama. Peran *China – Cambodia Economic and Trade Cooperation Joint Committee* akan ditingkatkan kembali dalam merencanakan, mengkoordinasi dan mempromosikan kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral secara komprehensif. Dalam hal itu kedua negara akan mengeksplor berbagai potensi baru pada bidang perdagangan bilateral, mengontrol pertumbuhan agar tetap stabil dan berupaya untuk mencapai target perdagangan bilateral per tahun yang berjumlah \$1 miliar pada tahun

2010. Beberapa upayanya ialah memberlakukan tarif preferensial bagi 418 produk Kamboja dan akan terus mengupayakan langkah untuk meningkatkan impornya dari Kamboja. Selain itu, perusahaan dari kedua negara memperkuat kerja sama dalam bidang infrastruktur, mineral, gas dan eksplorasi minyak, manufaktur, pengolahan tekstil dan bidang lainnya. Dan juga dari pihak Kamboja akan mengatur terkait fasilitas perdagangan, investasi dan kegiatan bisnis lainnya dari perusahaan Tiongkok di Kamboja (Xinhua, 2018).

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama perdagangan kedua negara yang pada sebelumnya telah meningkat secara drastis. Terlihat dari tahun 2007 kerjasama perdagangan kedua negara naik hingga 72 kali dibandingkan pada tahun 1992 yaitu menjadi US\$933 juta dan semakin meningkat hingga US\$946 juta pada tahun 2008.



**Table II.3****Variabel Perkembangan Perdagangan Bilateral Tiongkok - Kamboja**

	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
<b>Ekspor</b>	59.49	34.8	24.55	26	29.93
<b>Impor</b>	164.06	205.61	251.56	294.65	451.77
<b>Neraca</b>	(104.57)	(170.81)	(227.01)	(268.65)	(421.84)

	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2000-2008</b>
<b>Ekspor</b>	27.31	35.09	51.07	12,930,968.00	12,931,256.24
<b>Impor</b>	536.03	697.76	882.93	933,435,813.00	933,439,297.37
<b>Neraca</b>	(508.72)	(662.67)	(831.86)	(920,504,845.00)	(920,508,041.13)

**Sumber:** Bangkok Research Report, 2009, hal: 18

- c) Memperluas bidang kerja sama. Selain di bidang ekonomi dan perdagangan, pertukaran dan kerja sama juga diperluas ke berbagai bidang lainnya yaitu: pertanian, transportasi, budaya, pendidikan, kesehatan, industri informasi, olahraga dan pariwisata (Baijie, 2016).
- d) Meningkatkan hubungan antar badan legislatif dan berbagi pengalaman dalam pemerintahan. Kedua negara juga sepakat menjaga hubungan tingkat tinggi yang selama ini kerap dilakukan dan mendalami kerja sama penegakan hukum, pengalaman tata kelola negara dan diplomasi (Huaxia, 2016).
- e) Meningkatkan pertukaran dan kerja sama militer dalam masalah keamanan non-tradisional. Beberapa kerja sama militer dilakukan beberapa diantaranya ialah Kamboja menjadi tuan rumah latihan angkatan laut

bersama, mengadakan pameran militer bersama, dan memberikan bantuan berupa perlengkapan militer termasuk transportasinya dan dana sekitar US\$ 240 juta (Sovuthy, 2018). Dan sebelumnya Tiongkok, melalui Menteri Pertahanan Tea Banh, menegaskan bahwa ia akan terus mendukung Kamboja dalam meningkatkan militerisasinya. Tiongkok juga menyumbangkan 26 truk militer dan 30.000 seragam militer pada tahun 2014, serta memberikan pinjaman senilai US\$ 195 juta dalam bentuk 12 helikopter tipe Z-9 Harbin pada tahun 2013 (Thul, 2015).

- f) Memperkuat koordinasi baik secara bilateral maupun multilateral guna menjaga kepentingan bersama. Hal yang dimaksudkan disini ialah diperkuatnya konsultasi diplomatik bilateral, berdiskusi tentang isu-isu internasional dan regional dan menjaga koordinasi dan kolaborasi yang erat untuk menjaga kepentingan bersama, juga untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan di regional dan internasional (Huaxia, 2016).

Melihat bahwa kerja sama *comprehensive partnership* kedua negara membawa keuntungan bagi masing-masing, akhirnya mereka sepakat untuk mengembangkan kerja sama tersebut menjadi *comprehensive strategic partnership* pada tahun 2010 pada saat kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Kamboja pasca Kongres Nasional *Communist Party of China* yang ke-18. Disepakatinya kerja sama yang terakhir dirasa sebagai kerja sama yang lancar dan praktis serta membuat kemajuan positif di semua bidang. Pasca disepakati kerja sama tersebut, kedua negara sering melakukan kunjungan tingkat tinggi, beberapanya ialah Ketua *Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC)*, Jia Qinglin,

menghadiri pemakaman Raja Norodom Sihanouk dan bertemu dengan Raja Norodom Sihamoni, lalu Perdana Menteri Li Keqiang bertemu dengan Perdana Menteri Hun Sen setelah Pameran Tiongkok – ASEAN ke-10 di Nanning, Guangxi (Affairs, 2014).

Kemajuan positif ditunjukkan pada bidang perdagangan bilateral, di paruh pertama kemajuan positif menunjukkan angka \$ 627 juta, meningkat lebih dari 37% dan menargetkan hingga \$ 2,5 miliar pada 2015. Target tersebut didukung dengan Tiongkok yang akan mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Kamboja dan membantu pembangunan zona ekonomi khusus. Sementara dari pihak Kamboja, akan mengeksport produk pertanian ke Tiongkok (Xinhua, 2010). Selain itu, hal yang membuat hubungan kedua negara ini meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dengan hasil nyata ialah karena adanya rencana aksi dan rencana kerja terperinci di bawah kerangka kerja *comprehensive strategic partnership* khusus yang baru (Vannarith, 2017).

Kemudian, sebagai kerabat dekat, Tiongkok juga mengajak Kamboja untuk turut bekerja sama dalam kebijakan Tiongkok dengan negara-negara terkait dalam *One Belt, One Road*. Praktis Hun Sen mengadakan kunjungan resmi dan menghadiri *Belt and Road Forum for International Cooperation* di Beijing. Dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara, Tiongkok sangat mementingkan perkembangan hubungannya dengan Kamboja. Tiongkok juga meminta kedua belah pihak meningkatkan kerja sama praktis dan melaksanakan rencana dan proyek guna mempromosikan pembangunan *Belt and Road Initiative*, khususnya dalam investasi (Qian, 2017). Dengan dijalankannya kebijakan *Belt and Road Initiative*, Kamboja telah menjadi penerima manfaat yang besar dari Tiongkok,

salah satunya ialah menandatangani kontrak investasi sekitar US\$ 7 miliar termasuk proyek *Greenway Group* dan jalan tol dari *Henan Transportation Investment Group* dari Phnom Penh ke Sihanoukville (Times K. , 2018). Dengan kebijakan Tiongkok tersebut, Kamboja merasa bahwa hubungan politik, ekonomi dan budaya keduanya mencapai puncak tertinggi dan akan membawa dampak yang positif di kemudian hari (Estate, 2018).

Dengan partisipasi Kamboja dalam *Belt and Road Initiative*, Investasi Tiongkok semakin meningkat, terutama guna memperlancar proses *Belt and Road Initiative*. Salah satunya di sektor energi, total lebih dari US\$ 7,5 miliar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Lalu, Tiongkok juga membangun dua PLTA besar, Bendungan Kemchay dengan kapasitas listrik sebesar 194 megawatt dan PLTA Lower Sesan II dengan kapasitas listrik sebesar 400 megawatt. Kedua PLTA tersebut cukup mengubah infrastruktur energi di Kamboja. Selain itu, infrastruktur transportasi juga ditawarkan Tiongkok yaitu: jembatan, jalan raya, kereta api dan pelabuhan. Pengembangan jalan raya nasional Kamboja dikembangkan Tiongkok pada 2040 sepanjang 2.230 kilometer sehingga menghubungkan provinsi-provinsi di Kamboja satu sama lain serta dengan negara-negara tetangganya (Lin, 2018). Ditambah beberapa jembatan sedang dalam masa pembangunan, salah satu yang paling populer ialah jembatan besar yang diberi nama '*cambodia-china friendship bridge*' atau disebut oleh masyarakat Kamboja dengan nama *Koh Thom Bridge*, jembatan yang berdiri untuk menyebrangi Sungai Mekong dan menghubungkan provinsi Kampong Cham dan provinsi Tboung Khmum. Dan pembangunan yang paling berpengaruh bagi Kamboja dalam skema

*Belt and Road Initiative* ini adalah usulan Tiongkok untuk proyek pembangunan dan renovasi kereta api di Kamboja, beberapa diantaranya ialah:

1. Kereta api yang menghubungkan provinsi Preah Vihear, selatan provinsi Kampong Thom, Kampong Chhang, Kampong Speu dan provinsi Koh Kong sepanjang 405 km.
2. Kereta api yang menghubungkan ibukota Phnom Penh dan provinsi Preah Sihanouk.
3. Kereta api antara ibukota Phnom Penh, Poipet dan Thailand.
4. Kereta api yang menghubungkan antara ibukota Phnom Penh, provinsi Snoul hingga Vietnam.
5. Dan kereta api penghubung ibukota Phnom Penh dengan Pelabuhan Otonomi Phnom Penh (Rose, 2017).

Partisipasi Kamboja dalam *Belt and Road Initiative* rupanya membawa keuntungan bagi pembangunan negaranya. Tak hanya itu, melalui inisiatif ini, pada tahun 2015 Kamboja dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian tentang penguatan kerjasama dan investasi di bidang industri. Sehingga Kamboja menganggap bergabungnya pada *Belt and Road Initiative* merupakan strategi pembangunan utama dalam memperluas perdagangan dan investasi di negaranya (Xin, 2017). Melihat hal tersebut sebagai keuntungan besar, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan bahwa *Belt and Road Initiative* selaras dengan *Rectangular Strategy* milik Kamboja yang diluncurkan tahun 2004. Penyelarasan kedua proyek tersebut membawa kesempatan pada kerjasama kedua negara yang luas sehingga dapat mempercepat pembangunan. Kedua belah pihak juga berfokus pada

implementasi proyek dan menjadikan proyek pembangunan tersebut untuk industri yang relevan dengan strategi pembangunan Kamboja (Pingchao, 2018).

Selain kerangka kerja sama multilateral dari Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative*. Kedua negara juga bekerja sama dalam pembangunan zona ekonomi khusus yang bertempat di Sihanoukville. Meskipun kerja sama ini masih termasuk dari pelaksanaan *Belt and Road Initiative*, namun pencapaiannya cukup membantu pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Kamboja. Pembangunan jalan tol dari ibukota Phnom Penh menuju provinsi Sihanoukville dan bandara internasional Siem Reap merupakan salah dua pembangunan yang cukup penting bagi pencapaian yang telah disebutkan sebelumnya (Yi, 2018). Zona ekonomi khusus yang dikembangkan bersama tersebut juga telah berhasil memikat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut yaitu sebanyak 100 perusahaan internasional, sehingga dari banyaknya perusahaan internasional yang tertarik untuk berinvestasi menghasilkan lebih dari 10.000 lapangan pekerjaan. Intensitas investasi Tiongkok di Kamboja membuat kedua negara mengadakan forum bersama-sama, yaitu pada tahun 2017 diadakannya *the China-Cambodia Capacity and Investment Cooperation Forum* dan *Lancang-Mekong National Economic and Technological Cooperation* (Dian, 2018).

Forum yang pertama yaitu investasi dan bisnis diadakan oleh *Council for the Development of Cambodia* (CDC) bersama *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) dan *China Chamber of International Commerce* (CCOIC) yang mempertemukan sekitar 50 eksekutif bisnis dari Tiongkok bersama para pejabat dan beberapa pebisnis dari Kamboja. Forum yang digelar di Phnom Penh tersebut bertujuan untuk melihat berbagai potensi lebih guna

meningkatkan kerja sama Tiongkok – Kamboja dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Di forum tersebut perwakilan kedua negara berdiskusi dan bertukar pikiran lebih dalam untuk mencapai hasil yang lebih bermanfaat (Pengying, 2018).

Lalu pada forum kedua yaitu *Lancang-Mekong Cooperation* (LMC), Tiongkok dan Kamboja juga berpartisipasi bersama beberapa negara lainnya yaitu Lao PDR, Vietnam, Thailand dan Myanmar. Skema kerja sama sub-regional ini digabungkan berdasarkan sungai terpanjang ke-12 di dunia yaitu Sungai Mekong, atau dikenal juga sebagai Sungai Lancang di Tiongkok. Kerja sama tersebut menyepakati tiga bidang utama yang menjadi prioritas, yaitu politik dan keamanan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pertukaran sosial, budaya serta pertukaran *people-to-people*. Kerja sama sub regional ini dimulai dengan pembangunan lima bidang yaitu pengelolaan sumber daya air, kerja sama ekonomi lintas batas, dan konektivitas sungai, jalan serta kereta (Commission M. R., 2016). Kerja sama LMC ini juga menguatkan hubungan Tiongkok dan Kamboja. Sebagaimana PM Li Keqiang yang melakukan kunjungan resmi ke Kamboja pasca pertemuan puncak KTT LMC (Zhou, 2018).

Tahun ini menandakan 60 tahun hubungan diplomatik Tiongkok dan Kamboja. Kedua negara telah bekerja sama dalam berbagai perjanjian, menjalin menjaga hubungan yang harmonis dan saling mendukung kepentingan satu sama lain. Kedua pemimpin negara pun saling mengucapkan selamat guna menandai peringatan ke 60 tahun hubungan mereka. Dengan peringatan ini juga meyakinkan kedua belah pihak untuk terus meningkatkan hubungan persahabatan dan terus memperdalam kerja sama komprehensif strategis mereka (Xinhua, 2018).

### II.3 Kedekatan Tiongkok – Kamboja

Perkembangan hubungan Tiongkok dan Kamboja membuat mereka semakin dekat, hal tersebut tentu berdampak pada keberadaan mereka di berbagai forum internasional. Kedua negara juga menganggap hubungan mereka layaknya kerabat dekat sebagaimana seperti yang dikatakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, pada konferensi reguler saat menandai ulang tahun ke-60 hubungan Tiongkok-Kamboja:

*Tiongkok dan Kamboja merupakan tetanga yang baik, teman yang baik, mitra yang baik dan saudara yang baik.... Hubungan Tiongkok-Kamboja telah membawa manfaat yang nyata bagi kedua negara, memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pembangunan kawasan ini dan dunia pada umumnya, serta menjadi model untuk hubungan country-to-country. Tiongkok puas dengan kemajuan substansial dalam hubungan bilateral kita (Gao, 2018).*

Selain menganggap hubungannya bermanfaat, Tiongkok membela Kamboja pada Pemilihan Umum di tahun 2018. Dengan berdalih bahwa ia kerabat dekat Kamboja, Tiongkok justru menyatakan hal berseberangan dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mengecam pemilihan umum yang terjadi di Kamboja dianggap tidak adil, karena sebelum pemilihan umum dilaksanakan partai oposisi utama *Cambodia National Rescue Party* dibubarkan dan pemimpinnya ditangkap (Sony, 2018), sehingga negara-negara Barat melayangkan kecaman berupa sanksi ekonomi. Sedangkan Tiongkok justru memberikan pinjaman dana sebesar US\$ 259 juta kepada Kamboja di tengah-



tengah masa kampanye resmi guna membiayai *ring road* di Phnom Penh (Tom Allard, Prak Chan Thul, 2018). Selain itu, Tiongkok juga mengucapkan selamat atas ‘kelancaran’ pemilihan di Kamboja, hal tersebut disampaikan oleh *state councillor* Tiongkok, Wang Yi, pada saat bertemu dengan Prak Sokhon, Menteri Luar Negeri Kamboja, di forum regional di Singapura. Wang juga menegaskan bahwa Tiongkok akan selalu mendukung Kamboja dalam melindungi kedaulatan, kemandirian dan stabilitas negaranya serta menentang negara manapun yang mencampuri urusan dalam negeri Kamboja (Blanchard, 2018).

Lalu sebelumnya Tiongkok juga pernah membela Kamboja pada saat *Cambodian People’s Party* (CPP) mendapat tekanan internasional untuk melakukan reformasi karena tindakannya untuk menghilangkan perbedaan politik dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi yaitu membunuh aktifis buruh pada tahun 2004 dan membawa anggota parlemen dari partai oposisi yang bernama Cheam Channy ke pengadilan dengan tuduhan tak berdasar yaitu membentuk kelompok pemberontak pada tahun 2005 (Ciorciari, 2014). Tak hanya didukung, pada saat Kamboja mendapat tekanan dari badan internasional atau negara lain atas pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, penindasan masyarakat hingga penyalahgunaan kekuasaan, Kamboja justru berlari ke Tiongkok ketimbang memperbaikinya (Ear, 2012). Seperti pada tahun 2010 saat *World Bank* menghentikan pinjaman ke Kamboja akibat menggusur paksa masyarakat desa di sekitar danau Boueng Kak karena terdapat proyek pengembangan di daerah tersebut. Namun Kamboja seolah tidak menghiraukan hal tersebut, ia justru mendekati perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi (Ko, 2010).

Tidak hanya Tiongkok yang membela Kamboja, Kamboja juga mendukung kebijakan *One China Policy*, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Majelis Nasional Kamboja, Heng Samrin, bahwa Kamboja mendukung Tiongkok tersebut sebagai dukungan kontinuitas dan berterima kasih atas dukungan pembangunan Kamboja oleh Tiongkok (Narim, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Perdana Menteri Hun Sen pada saat menerima kunjungan anggota politbiro *Communist Party of China (CPC)*, HE Sun Chunlan, dan Kepala Departemen *United Front Work CPC Central Committee*, ia menegaskan bahwa Kamboja akan terus mendukung *One China Policy*. Hun Sen menggarisbawahi bahwa Kebijakan Tiongkok tersebut akan terus didukung guna menjaga stabilitas regional dan hubungan strategis ASEAN-Tiongkok, khususnya Kamboja-Tiongkok serta demi kepentingan bersama (C.Nika, 2017). Karena desakan Taiwan yang terus menerus meminta pengakuan dari negara-negara Asia Tenggara berpotensi membuat kawasan tersebut menjadi tidak stabil, Kamboja akan membahas permasalahan ini pada forum ASEAN (VOA, 2007). Yang lebih terlihat lagi Kamboja melarang pejabat pemerintahnya melakukan kunjungan resmi ke Taiwan atau menghadiri pertemuan fungsional di negara tersebut (Vannarith, 2009). Lalu pada tahun 1999 PM Hun Sen mengirim surat PM Tiongkok saat itu, Zhu Rongji, yang berisi bahwa Kamboja mengecam pengeboman yang dilakukan NATO terhadap Kedutaan Besar Tiongkok di Belgrade sehingga menyebabkan tiga orang meninggal dan 20 orang terluka. Kamboja menegaskan bahwa tragedi tersebut merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan hukum internasional (Kyodo, 1999)

Selain mendukung Tiongkok pada kebijakan *One China Policy*, Kamboja juga mendukung Tiongkok pada sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa yang melibatkan beberapa anggota ASEAN yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan Tiongkok tersebut telah dibawa ke Pengadilan Arbitrase Den Haag dengan hasil putusan penolakan 90% klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan. Kemudian Filipina dan Vietnam menginginkan ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama merujuk pada putusan Pengadilan Arbitrase tersebut (Baldwin, 2016). Namun pertemuan para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN pasca kemenangan Filipina di Pengadilan Arbitrase di Den Haag, akan membuat pernyataan bersama untuk menghormati proses diplomatik dan hukum internasional. Namun Kamboja melakukan veto pada pernyataan bersama tersebut sehingga forum menjadi kacau (Willemyns, 2016). Veto yang dilakukan Kamboja dianggap mendukung posisi Tiongkok. *Deadlock* tersebut juga pernah terjadi pada KTT ASEAN tahun 2012 dengan kejadian yang sama yaitu Kamboja yang menolak pembahasan tentang Laut Cina Selatan (Manuel Mogato, Simon Webb, 2016). Tak hanya itu, secara terbuka juga Kamboja mendukung posisi Tiongkok pada sengketa maritime tersebut. Disampaikan oleh Perdana Menteri Hun Sen bahwasannya sengketa ini bukanlah masalah bagi ASEAN sehingga masalah ini perlu didiskusikan secara bilateral antara negara-negara terkait (Sothanarith, 2015). Serupa dengan kemauan Tiongkok yang menginginkan permasalahan ini dirundingkan melalui negosiasi bilateral antar negara yang bersengketa.

Akan tetapi pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Filipina Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, membela sikap Kamboja yang dituduh mendukung Tiongkok pada sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Prak

Sokhonn mengatakan bahwa negaranya apa yang telah dilakukan Kamboja adalah tindakan yang netral dan independen (Dara, 2017). Di pertemuan tersebut juga akhirnya pernyataan bersama ASEAN dikeluarkan dengan penegasan kata '*non-militarization and self-restraint*' pada wilayah yang disengketakan. Inti dari hasil pernyataan tersebut ialah bahwa segala kegiatan di daerah tersebut dapat mengurangi kepercayaan, meningkatkan ketegangan dan dapat merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan (Sassoon, 2017).

Saling memberikan dukungan seperti hal-hal yang telah disebutkan tentu akan terus berlanjut di kemudian hari, namun sepertinya kedua belah pihak cenderung tidak akan mengambil tanggungan besar dari saling mendukung satu sama lain. Hal ini juga dapat menjadi indikasi kedekatan hubungan kedua negara sehingga perlu juga melihat dukungan dari Kamboja ke Tiongkok.